



Analisis Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan di Sumatera Utara

Ammalia Shelky Nakwa Jamalika Putri^{1*}, Khairunnisa², Sri Wahyuni³

¹⁻³Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : imelammalia@gmail.com¹, khairuunniisaa@gmail.com², y Sri Wahyuni977@gmail.com³

**Penulis Korespondensi: imelammalia@gmail.com*

Abstract. The purpose of this study is to evaluate income inequality and poverty as key indicators of uneven economic development in North Sumatra Province in 2024. This study analyzed various secondary sources, including BPS reports, SINTA-indexed national journals, and regional economic policy publications. The results show that regencies in the west coast and mountainous regions of North Sumatra tend to be lagging behind, while urban areas such as Medan and Deli Serdang have the highest concentration of economic growth, meaning that income inequality remains at a moderate-high level. The finding that economic progress remains uneven is reinforced by the fact that the poverty rate remains higher than the national average. From the results of this study, not only economic factors influence inequality and poverty, but also structural factors such as infrastructure access, human labor quality, and regional fiscal inequality. Therefore, more inclusive and integrated policies are needed to address inequality and improve welfare across all provinces.

Keywords: Economic Development; Income Inequality; North Sumatra; Poverty; Uneven Development.

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan sebagai indikator utama ketidakmerataan pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024. Penelitian ini menganalisis berbagai sumber sekunder, termasuk laporan BPS, jurnal nasional terindeks SINTA, dan publikasi kebijakan ekonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kabupaten di wilayah pantai barat dan pegunungan Sumatera Utara cenderung tertinggal, sementara wilayah perkotaan seperti Medan dan Deli Serdang memiliki konsentrasi pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi, yang berarti ketimpangan pendapatan masih berada pada level moderat–tinggi. Temuan bahwa kemajuan ekonomi masih belum merata diperkuat oleh fakta bahwa tingkat kemiskinan masih lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Dari hasil penelitian ini, tidak hanya faktor ekonomi yang memengaruhi ketimpangan dan kemiskinan, tetapi juga faktor struktural seperti akses infrastruktur, kualitas tenaga kerja manusia, dan ketimpangan fiskal daerah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan terintegrasi untuk mengatasi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan di seluruh wilayah provinsi.

Kata kunci: Kemiskinan; Ketimpangan Pendapatan; Ketidakmerataan Pembangunan; Pembangunan Ekonomi; Sumatera Utara.

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi idealnya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pemerataan infrastuktur, kualitas tenaga kerja manusia, dan ketimpangan fiskal daerah. Namun, kondisi Sumatera Utara tahun 2024 menunjukkan adanya disparitas ekonomi yang cukup kuat. Berdasarkan data BPS, ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan Gini Ratio masih berada pada kisaran 0,32–0,35, menunjukkan ketimpangan menengah. Sementara itu, tingkat kemiskinan di beberapa kabupaten seperti Nias, Mandailing Natal, dan Padang Lawas Utara masih berada di atas rata-rata provinsi.

Ekonomi Sumut tumbuh dengan cepat pada tahun 2024, tetapi pertumbuhannya tidak merata di seluruh negara. Wilayah perkotaan seperti Medan, Binjai, dan Deli Serdang menjadi pusat aktivitas ekonomi, sementara sebagian besar daerah pedesaan tertinggal dalam hal pendidikan, infrastruktur, dan lapangan kerja.

2. KAJIAN TEORITIS

Definisi Ketimpangan

Ketimpangan Salah satu tujuan pembangunan ekonomi suatu wilayah adalah untuk mengurangi ketimpangan, yang didefinisikan sebagai disparitas pembangunan ekonomi yang disebabkan oleh perbedaan dalam pertumbuhan ekonomi secara vertikal dan horizontal. Todaro (2011) menyatakan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan terjadi ketika pendapatan tidak dihitung berdasarkan kepemilikan individu dan faktor produksi.

Meningkatnya pendapatan per kapita dapat menunjukkan kemajuan ekonomi di sebuah wilayah, tetapi peningkatan pendapatan per kapita tidak selamanya menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata. Di negara-negara berkembang, ekonomi seringkali berfokus pada penggunaan modal daripada tenaga kerja, sehingga keuntungan ekonomi hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang. Ada ketimpangan jika pendapatan nasional tidak didistribusikan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat.

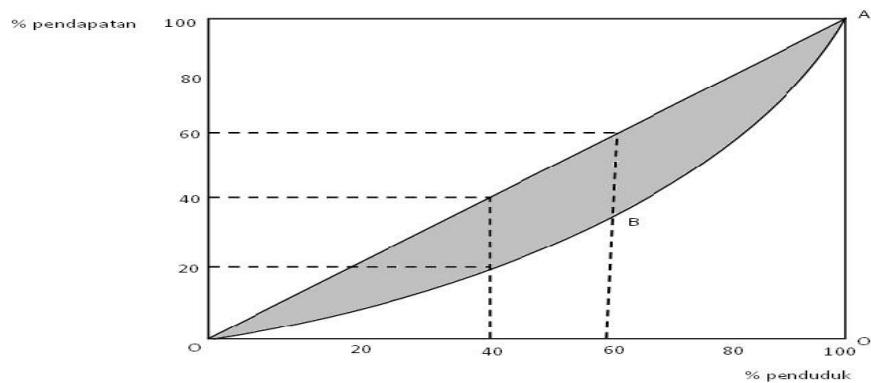
Jenis-jenis Ketimpangan

Distribution Income Disparities (Ketimpangan Distribusi Pendapatan)

Ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan merujuk pada pembagian yang tidak merata dari total pendapatan nasional di antara berbagai unit rumah tangga dalam suatu negara. Terdapat berbagai instrumen yang tersedia untuk mengukur tingkat ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan penduduk, meliputi:

1) Kurva Lorenz (*Lorenz Curve*)

Kurva Lorenz umumnya dimanfaatkan untuk memvisualisasikan pola ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan masyarakat. Kurva ini mengilustrasikan korelasi kuantitatif antara persentase penerima pendapatan dengan proporsi pendapatan total yang mereka peroleh pada periode waktu tertentu, seperti periode tahunan.



Gambar 1. Kurva Lorenz.

Kurva Lorenz divisualisasikan dalam sebuah grafik persegi atau bujursangkar dengan bantuan garis diagonal. Sumbu horizontal merepresentasikan proporsi penduduk yang menerima pendapatan, sementara sumbu vertikal menunjukkan proporsi total pendapatan. Tingkat ketimpangan ekonomi yang lebih rendah ditunjukkan oleh kurva yang lebih mendekati garis diagonal, sedangkan kurva yang semakin menjauh dari diagonal mengindikasikan tingkat ketimpangan yang lebih tinggi.

2) Indeks Gini

Indeks Gini merupakan suatu metode kuantitatif untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan dalam suatu populasi, dengan nilai berkisar dari nol yang melambangkan kesetaraan penuh hingga satu yang menunjukkan ketimpangan mutlak. Koefisien Gini dapat ditentukan untuk setiap kurva Lorenz dengan menghitung perbandingan antara area di bawah kurva Lorenz dan area total di bawah garis diagonal sempurna. Rentang nilai maksimum dan minimum untuk indeks G adalah : $0 \leq G \leq 1$.

Untuk menghitung *Gini Index* yaitu :

$$G = 1 - \sum_{i=1}^n (P_i - P_{i-1})(Q_i + Q_{i-1}) \text{ dimana :}$$

$G = Gini\ Index$

P_i = Persentase kumulatif jumlah penduduk sampai kelas ke-i

Q_i = Persentase kumulatif jumlah pendapatan sampai kelas ke-i $i = 1, 2, 3, \dots, n$

$G = 0$, *Perfect Equality*

$G = 1$, *Perfect Inequality*

b. Regional Income Disparities

Perbedaan yang ada tidak hanya terbatas pada penyebaran kekayaan di kalangan masyarakat, melainkan juga terlihat dalam perkembangan antar wilayah di suatu negara. Jeffrey G. Williamson (1965) mengeksplorasi korelasi antara ketidaksetaraan regional dan tingkat kemajuan ekonomi, seraya menganalisis data ekonomi dari negara-negara maju

dan negara-negara berkembang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada fase awal pembangunan, kesenjangan antar wilayah cenderung meningkat, dengan perkembangan ekonomi yang terfokus pada area-area spesifik.

Pada fase yang lebih progresif, apabila ditinjau dari perspektif pertumbuhan ekonomi, terlihat adanya harmonisasi antarwilayah yang disertai dengan penurunan disparitas yang substansial. Williamson memperkenalkan *Williamson Index* (Indeks Williamson) sebagai instrumen untuk mengkuantifikasi ketidaksetaraan pembangunan regional. Indeks Williamson mengandalkan PDRB per kapita sebagai basis data. Logika di baliknya adalah perbandingan yang dilakukan adalah mengenai tingkat pembangunan antarwilayah, bukan tingkat kesejahteraan antar kelompok demografis. Formulasi statistik dari Indeks Williamson sebagai berikut :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 \frac{f_i}{n}}}{Y}, 0 < IW < 1$$

Keterangan :

IW = Indeks Williamson

Y_i = Pendapatan per kapita daerah i

Y = Pendapatan per kapita rata-rata seluruh daerah

f_i = Jumlah penduduk daerah i

n = Jumlah penduduk seluruh daerah

Koefisien Indeks Williamson berada dalam rentang 0 hingga 1. Nilai indeks yang lebih rendah mengindikasikan tingkat ketidaksetaraan yang lebih kecil atau distribusi yang lebih merata, sedangkan nilai yang lebih tinggi menandakan ketidaksetaraan yang lebih besar. Salah satu keterbatasan indeks ini adalah sensitivitasnya terhadap definisi wilayah yang diterapkan dalam perhitungan. Hal ini berarti bahwa hasil perhitungan dapat bervariasi apabila teritori yang digunakan memiliki cakupan yang berbeda. Meskipun demikian, indeks ini tetap relevan dan efektif dalam mengukur kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan

Menurut Simon Kuznets, pada fase awal perkembangan ekonomi, terjadi kecenderungan penurunan kualitas dalam distribusi pendapatan, yang mengakibatkan pelebaran kesenjangan. Namun, seiring perkembangan waktu, distribusi pendapatan diperkirakan akan mengalami perbaikan. Untuk menguji hipotesis Kuznets, disusunlah sebuah grafik yang memperlihatkan korelasi antara pertumbuhan PDRB dan indeks ketimpangan (Indeks Williamson). Apabila

pola yang teramat dari interkoneksi kedua variabel tersebut membentuk kurva berbentuk "U terbalik", maka hipotesis Kuznets menyimpulkan bahwa meskipun terdapat peningkatan ketimpangan pada periode awal pertumbuhan ekonomi yang kemudian akan berangsur-angsur menurun pada fase-fase selanjutnya, pada akhirnya ketimpangan akan berkurang pada tahap pertumbuhan akhir.

Pembentukan kurva Kuznets dimungkinkan oleh proses perkembangan yang berkelanjutan, yang dipicu oleh ekspansi sektor modern seiring dengan pergeseran suatu negara dari struktur ekonomi tradisional menuju modern. Selain itu, seiring dengan perkembangan sektor modern yang dinamis, terdapat permintaan yang signifikan untuk tenaga kerja yang terampil, pendapatan yang diperoleh dari investasi dalam sektor pendidikan dapat mengalami peningkatan awal, namun pada akhirnya akan mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja terdidik dan berkurangnya jumlah angkatan kerja tidak terdidik. Dengan demikian, hipotesis ini secara fundamental selaras dengan tahapan pembangunan ekonomi. Meskipun demikian, Kuznets tidak mengidentifikasi mekanisme spesifik yang dapat menghasilkan kurva berbentuk U terbalik ini. Namun, tampaknya efek dari pengayaan sektoral pada sektor kontemporer dan tradisional terhadap kesenjangan pendapatan cenderung saling berlawanan.

Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan

Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap disparitas ekonomi antar provinsi di Indonesia meliputi:

- a. Variasi Konsentrasi Aktivitas Ekonomi Antar Wilayah

Ketidakseragaman yang signifikan dalam tingkat konsentrasi aktivitas ekonomi antar wilayah cenderung memperburuk ketimpangan pembangunan antar daerah. Hal ini dikarenakan wilayah dengan konsentrasi aktivitas ekonomi yang lebih tinggi akan mengalami percepatan dalam proses pembangunannya. Situasi yang berlawanan terjadi pada wilayah dengan konsentrasi aktivitas ekonomi yang lebih rendah.

Wilayah dengan konsentrasi aktivitas ekonomi yang substansial cenderung menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat. Kondisi ini kemudian akan memacu perkembangan pembangunan wilayah melalui perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Sebaliknya, wilayah dengan konsentrasi aktivitas ekonomi yang relatif minim dapat menghadapi peningkatan pengangguran dan penurunan tingkat pendapatan penduduk lokal.

Kegiatan ekonomi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, terdapatnya sumber daya alam yang lebih banyak pada daerah tertentu, misalnya minyak bumi, gas, batubara dan bahan mineral lainnya. Terdapatnya lahan yang subur juga turut mempengaruhi, khususnya menyangkut pertumbuhan kegiatan pertanian. Kedua, meratanya fasilitas transportasi, baik darat, laut, dan udara juga ikut mempengaruhi konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah. Ketiga, kondisi demografi (kependudukan) juga ikut mempengaruhi karena kegiatan ekonomi akan cenderung terkonsentrasi dimana sumber daya manusia tersedia dengan kualitas yang lebih baik.

b. Alokasi Investasi

Kurangnya investasi di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat per kapita di wilayah tersebut rendah.

c. Tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antar daerah

Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal antar propinsi juga merupakan faktor penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi regional.

d. Variasi dalam kekayaan sumber daya alam

Diskrepansi yang signifikan dalam ketersediaan sumber daya alam di berbagai wilayah dapat mengakibatkan ketidakseimbangan antar daerah. Komposisi sumber daya alam, seperti hidrokarbon atau potensi kesuburan tanah, secara inheren berdampak pada lintasan pembangunan di setiap wilayah. Beberapa wilayah dianugerahi cadangan minyak dan gas alam, sementara wilayah lain tidak memiliki sumber daya tersebut. Demikian pula, terdapat wilayah dengan deposit batu bara yang substansial, sedangkan wilayah lain tidak memiliki cadangan semacam itu. Hal serupa berlaku untuk tingkat kesuburan tanah, yang menunjukkan variabilitas yang cukup besar, sehingga memengaruhi strategi yang diterapkan untuk memajukan sektor pertanian di masing-masing wilayah.

Variasi dalam ketersediaan sumber daya alam secara inheren akan berdampak pada aktivitas produksi di wilayah terkait. Wilayah dengan cadangan sumber daya alam yang signifikan cenderung memiliki kemampuan untuk memproduksi komoditas tertentu dengan ongkos produksi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan wilayah lain yang memiliki cadangan sumber daya alam yang lebih terbatas. Situasi ini berpotensi mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut dibandingkan dengan wilayah lainnya.

e. Disparitas Kondisi Demografis

Faktor krusial lainnya yang berpotensi memicu ketidaksetaraan antar wilayah adalah adanya perbedaan signifikan dalam kondisi demografis antar wilayah tersebut. Kondisi demografis mencakup laju pertumbuhan dan komposisi populasi, tingkat literasi dan kesehatan masyarakat, ketersediaan lapangan kerja, serta pola perilaku sosial penduduk di wilayah bersangkutan.

Variasi dalam karakteristik demografis dapat berkontribusi pada disparitas antar wilayah, mengingat dampaknya terhadap efisiensi tenaga kerja di respective area. Wilayah dengan profil demografis yang menguntungkan cenderung memperlihatkan tingkat produktivitas yang lebih substantial, yang pada gilirannya akan memfasilitasi peningkatan investasi. Hal ini kemudian akan berujung pada ekspansi kesempatan kerja dan percepatan pertumbuhan ekonomi regional. Sebaliknya, wilayah dengan kondisi demografis yang kurang ideal berpotensi mengalami tingkat produktivitas tenaga kerja yang lebih rendah. Kondisi ini dapat mengurangi daya tarik untuk penanaman modal, yang mengakibatkan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Tabel 1. Tahapan Penelitian.

Tahap	Penjelasan
Jenis penelitian	Kualitatif deskriptif – <i>systematic literature review</i>
Sumber data	Jurnal SINTA, BPS, Bappeda Sumut, Bank Indonesia, publikasi 2018–2024
Teknik seleksi	inklusi–eksklusi (relevansi, keberbaruan, metodologi)
Analisis	Sintesis naratif + analisis tematik (ketimpangan, kemiskinan, pembangunan)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Terkait Pendapatan Per Kapita

Ketimpangan pendapatan jadi salah satu indikator penting untuk nilai pemerataan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Alat ukur yang biasa dipakai adalah Gini Ratio, di mana nilai 0 artinya pemerataan sempurna dan nilai 1 artinya ketimpangan total.

Data Gini Ratio Sumatera Utara tahun 2024 menunjukkan perbedaan yang cukup besar antar kabupaten/kota. Secara keseluruhan, rata-rata provinsi tercatat 0,297, yang berarti ketimpangan pendapatan masih sedang. Tapi kalau dilihat per kabupaten/kota, variasinya lebih jelas. Kabupaten/kota seperti Medan (0,356), Tebing Tinggi (0,335), dan Toba (0,348) punya ketimpangan yang relatif tinggi, artinya pendapatan banyak terkumpul di tangan sebagian kecil

masyarakat. Sebaliknya, daerah seperti Tapanuli Selatan (0,206), Karo (0,214), dan Labuhanbatu Selatan (0,212) Gini Ratio-nya lebih rendah, yang menandakan distribusi pendapatan lebih merata.

Fenomena ini menunjukkan pembangunan ekonomi di Sumatera Utara belum merata secara geografis. Ketimpangan tinggi di kota besar biasanya karena konsentrasi aktivitas ekonomi seperti perdagangan, industri, dan jasa, sementara daerah dengan Gini rendah umumnya bergantung pada aktivitas ekonomi yang lebih seragam seperti pertanian atau sektor primer lainnya.

Kabupaten Kota	GINI RATIO SUMATERA UTARA MENURUT KABUPATEN/KOTA 2024
Sumatera Utara	0.297
Nias	0.247
Mandailing Natal	0.25
Tapanuli Selatan	0.206
Tapanuli Tengah	0.234
Tapanuli Utara	0.242
Toba	0.348
Labuhan Batu	0.251
Asahan	0.248
Simalungun	0.257
Dairi	0.215
Karo	0.214
Deli Serdang	0.262
Langkat	0.26
Nias Selatan	0.247
Humbang Hasundutan	0.302
Pakpak Bharat	0.262
Samosir	0.238
Serdang Bedagai	0.242
Batu Bara	0.258
Padang Lawas Utara	0.223
Padang Lawas	0.224
Labuhanbatu Selatan	0.212
Labuanbatu Utara	0.239
Nias Utara	0.234
Nias Barat	0.219
Sibolga	0.313
Tanjungbalai	0.236
Pematangsiantar	0.297
Tebing Tinggi	0.335
Medan	0.356
Binjai	0.312
Padangsidimpuan	0.296
Gunungsitoli	0.277

Gambar 2. Gini Ratio.

Temuan Utama Literatur

Ketimpangan tertinggi berada di wilayah perkotaan dan kawasan industri

Ketimpangan terbesar di Sumatera Utara terdapat di wilayah perkotaan yang menjadi pusat konsentrasi aktivitas, terutama Kota Medan, yang memiliki PDRB per kapita tertinggi sekaligus jumlah penduduk terbanyak. Ketimpangan pembangunan di provinsi ini telah menjadi persoalan penting yang perlu penanganan secara menyeluruh. Jika dibiarkan tanpa kebijakan yang tepat, kondisi ini berisiko menimbulkan berbagai krisis multidimensi, baik dari sisi demografi, sosial-ekonomi, politik, maupun lingkungan, yang pada akhirnya bisa menghambat agenda pembangunan daerah secara keseluruhan.

Ketidaksetaraan ekonomi di Sumatera Utara terlihat jelas dari perbedaan yang nyata dalam pembagian pendapatan, tingkat kemakmuran, akses terhadap pendidikan, peluang pekerjaan, serta kualitas kehidupan masyarakat di antara berbagai kabupaten dan kota. Fenomena kesenjangan ini merupakan akibat yang wajar dari variasi ciri-ciri wilayah, potensi sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, serta tingkat investasi yang tidak merata di antara daerah-daerah. Kesenjangan pembangunan juga muncul akibat pengumpulan kegiatan ekonomi di daerah perkotaan dan industri, yang mengakibatkan wilayah lainnya, seperti pantai barat, dataran tinggi, serta kepulauan Nias, memiliki pendapatan per kapita yang lebih kecil.

a. Wilayah dengan ketimpangan tinggi:

- 1) Kota Medan: Memiliki PDRB per kapita tertinggi dan konsentrasi penduduk tertinggi, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang sangat terkonsentrasi.
- 2) Kawasan industri: Aktivitas ekonomi yang terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan industri juga menjadi penyebab ketimpangan.

b. Wilayah dengan ketimpangan rendah:

- 1) Kabupaten di kepulauan Nias: Merupakan wilayah yang paling tertinggal dengan pendapatan per kapita jauh lebih rendah dibandingkan wilayah maju seperti Medan.
- 2) Kawasan pantai barat dan dataran tinggi: Memiliki pendapatan per kapita yang lebih rendah dibandingkan kawasan pantai timur Sumatera Utara.

Kemiskinan lebih dominan di daerah dengan struktur ekonomi berbasis pertanian tradisional

Pertanian konvensional merujuk pada metode budidaya yang masih mengandalkan perkakas dasar, teknologi minim, serta metode kerja manual, yang mengakibatkan kuantitas produksi yang tidak signifikan. Wilayah yang masih didominasi oleh sektor pertanian konvensional umumnya menunjukkan karakteristik sebagai berikut:

- a. Pendapatan per kapita rendah, karena nilai tambah dari hasil pertanian kecil.

- b. Lapangan kerja terbatas, karena tidak ada diversifikasi sektor (industri dan jasa belum berkembang).
- c. Produktivitas rendah, karena teknologi belum berkembang dan modal kecil.

Beberapa penyebab utama mengapa kemiskinan masih dominan di daerah pertanian tradisional antara lain:

a) Produktivitas Pertanian Rendah

Keterbatasan penggunaan teknologi, benih unggul, dan sarana produksi menyebabkan hasil pertanian rendah. Akibatnya, pendapatan petani tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.

b) Ketergantungan pada Alam

Perubahan iklim, gagal panen, atau serangan hama dapat langsung menurunkan pendapatan. Karena tidak ada sumber penghasilan lain, petani mudah jatuh miskin.

c) Keterbatasan Akses terhadap Modal dan Pasar

Petani tradisional sulit mendapatkan pinjaman modal karena tidak memiliki jaminan. Selain itu, akses ke pasar seringkali terhambat oleh jarak, infrastruktur, dan kekuasaan tengkulak yang menekan harga jual hasil pane

d) Rendahnya Tingkat Pendidikan dan Keterampilan

Sebagian besar masyarakat di daerah pertanian tradisional memiliki pendidikan rendah. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk bekerja di sektor lain atau menerapkan teknologi baru dalam bertani.

e) Kurangnya Diversifikasi Ekonomi

Kegiatan ekonomi di daerah tersebut umumnya hanya berfokus pada pertanian. Akibatnya, saat musim paceklik atau gagal panen, tidak ada sumber pendapatan alternatif.

Pembangunan infrastruktur terkonsentrasi di daerah jalur perdagangan (Medan–Tebing Tinggi–Pekanbaru).

Pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara pada tahun 2024 umumnya terpusat pada rute perdagangan Medan–Tebing Tinggi–Pekanbaru. Hal ini disebabkan oleh karena rute tersebut berfungsi sebagai koridor perdagangan utama yang menyambungkan pusat-pusat ekonomi penting di provinsi ini. Infrastruktur jalan dan transportasi memiliki peranan krusial dalam kelancaran pengiriman barang dan jasa, sehingga pengembangan difokuskan untuk menunjang aliran perdagangan, khususnya sektor perdagangan grosir dan ritel yang berpengaruh di Tebing Tinggi.

Pengumpulan pembangunan di rute ini memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi di sekitarnya, melalui peningkatan efisiensi pengiriman, percepatan perpindahan barang, serta kemudahan akses ke pasar bagi para pengusaha setempat. Daerah-daerah yang terletak di sepanjang jalur perdagangan ini menunjukkan peningkatan kegiatan ekonomi, investasi, serta kesempatan kerja, sehingga tingkat kemakmuran masyarakat umumnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah yang terpencil dari rute tersebut. Akan tetapi, penekanan pembangunan semacam ini juga memicu ketidakmerataan pembangunan, sebab daerah di luar koridor perdagangan utama cenderung kurang mendapatkan akses ke infrastruktur yang cukup. Kondisi ini berpotensi memperluas jurang ekonomi antarwilayah, walaupun secara umum pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara mengalami percepatan di koridor perdagangan utama tersebut.

Hubungan Ketimpangan & Kemiskinan

Tingginya ketimpangan tidak otomatis menurunkan kemiskinan

Kemiskinan merujuk pada keadaan di mana penghasilan individu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar sesuai dengan standar atau ambang batas kemiskinan yang berlaku. Sebuah individu dikategorikan miskin apabila rata-rata penghasilan per kapitanya bulanan berada di bawah tingkat kemiskinan yang ditetapkan. Sementara itu, ketidaksetaraan menggambarkan adanya jurang pemisah dalam hal pendapatan antara kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan tinggi dan rendah. Walaupun secara konseptual pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan per kapita dan memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, namun dalam praktiknya, manfaat positif dari pertumbuhan tersebut kerap kali hanya dirasakan oleh segelintir kalangan masyarakat, terutama oleh 20% penduduk dengan pendapatan tertinggi.

Sejalan dengan penjelasan di atas, Suparman berpendapat bahwa elastisitas ketidaksetaraan senantiasa bernilai positif, yang berarti penurunan ketidaksetaraan akan berimplikasi pada pengurangan kemiskinan. Afandi menyatakan bahwa distribusi yang tidak merata dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, termasuk terhambatnya pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan meningkatnya angka kemiskinan. Temuan ini juga konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa ketidaksetaraan pendapatan berkontribusi signifikan terhadap kemiskinan. Faktor utama kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendapatan yang diterima oleh suatu keluarga, ditambah dengan banyaknya jumlah anggota keluarga. Kondisi perekonomian keluarga miskin yang sudah berada di bawah garis kemiskinan ini semakin memburuk seiring dengan meningkatnya ketidaksetaraan pendapatan atau kesejahteraan.

Pola pembangunan di Sumut menunjukkan "dual economy"

Secara umum, pola pembangunan di Sumatera Utara (Sumut) memperlihatkan indikasi dualisme ekonomi. Dualisme ekonomi mengacu pada situasi di mana sektor ekonomi yang modern, maju, dan berorientasi pada modal beroperasi bersamaan dengan sektor ekonomi tradisional yang cenderung bersifat subsisten dan padat karya. Terdapat beberapa bukti yang mendukung fenomena ini.

- a. Sektor Pertanian vs Industri Modern: Mayoritas penduduk di daerah dataran tinggi Sumatera Utara tetap bergantung pada sektor agrikultur, meliputi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan rakyat, yang nota bene masih bersifat konvensional dan belum mencapai potensi optimal. Sebaliknya, sektor industri yang lebih maju, seperti perkebunan skala besar (kelapa sawit, karet), Hutan Tanaman Industri (HTI), serta sektor jasa (perdagangan besar, properti), menunjukkan pertumbuhan yang lebih signifikan, terindustrialisasi, dan memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Perkembangan ini terutama terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan area di sekitar zona industri.
- b. Ketimpangan Regional: Teramati adanya disparitas yang nyata dalam capaian pembangunan dan tingkat pendapatan antar wilayah. Wilayah perkotaan, contohnya Medan dan area sekitarnya, menunjukkan kemajuan yang lebih baik berkat infrastruktur yang memadai dan posisinya sebagai pusat kegiatan ekonomi. Sebaliknya, daerah pedesaan atau wilayah lain mengalami pertumbuhan ekonomi yang masih berada di bawah rata-rata provinsi, yang dikategorikan sebagai pertumbuhan rendah.
- c. Kesenjangan Kesejahteraan dan Lapangan Kerja: Sektor ekonomi modern cenderung mengutamakan penggunaan modal dan membutuhkan jumlah tenaga kerja yang lebih terbatas jika dibandingkan dengan sektor tradisional yang mengandalkan banyak pekerja. Kondisi ini menghadirkan tantangan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang adil di seluruh lapisan masyarakat, sekaligus mengindikasikan adanya ketidaksetaraan dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi.
- d. Infrastruktur: Walaupun upaya pembangunan infrastruktur telah gencar dilaksanakan, kesenjangan dalam hal akses dan mutu infrastruktur tetap ada antara kawasan yang maju dan kawasan yang kurang berkembang, terutama di daerah pedesaan. Hal ini berimplikasi pada rendahnya nilai tambah pada sektor ekonomi pedesaan.

Pemerintah daerah menghadapi dilema untuk menanggulangi kesenjangan ini dengan memacu akselerasi pembangunan ekonomi pada sektor-sektor yang memiliki potensi guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta mengoptimalkan efektivitas program pengentasan kemiskinan yang lebih merata.

Tabel 2. Analisis Penyebab.

Faktor	Dampak
Akses infrastruktur tidak merata	Hambat mobilitas barang & tenaga kerja
Ketergantungan ekonomi pada kota besar	Pusat pertumbuhan tidak tersebar
Ketimpangan kualitas SDM	Pendidikan & kesehatan rendah di pedesaan
Kebijakan fiskal daerah tidak seimbang	

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Analisis terhadap pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024 mengindikasikan bahwa distribusinya belum optimal, yang ditandai dengan disparitas pendapatan yang signifikan dan prevalensi kemiskinan yang cukup tinggi. Koefisien Gini Ratio, yang berada dalam rentang 0,297 hingga 0,356, menggambarkan adanya ketidaksetaraan pada tingkat menengah, dengan perbedaan yang jelas antara kawasan perkotaan dan pedesaan. Sementara itu, area seperti Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang telah menjadi episentrum perkembangan ekonomi yang didorong oleh aktivitas industri dan sektor jasa, wilayah lain seperti Nias, Mandailing Natal, dan daerah pegunungan masih menghadapi tantangan pembangunan karena keterbatasan akses terhadap fasilitas infrastruktur, kualitas pendidikan, serta peluang kerja.

Untuk lebih lanjut, hasil penelitian mengungkap adanya konfigurasi dualisme ekonomi, di mana sektor modern yang mengandalkan modal berkembang secara paralel dengan sektor tradisional yang berbasis tenaga kerja, menghasilkan jurang kesejahteraan yang cukup lebar. Kemiskinan tetap menjadi isu utama di area yang mengandalkan struktur ekonomi pertanian tradisional. Sektor ini cenderung memiliki tingkat produktivitas yang rendah dan sangat bergantung pada faktor-faktor alam. Selain itu, perbedaan dalam ketersediaan infrastruktur dan distribusi kebijakan fiskal yang belum merata semakin memperlebar jurang ketidaksetaraan antarwilayah. Semua faktor ini secara kolektif mengindikasikan bahwa perkembangan ekonomi di Sumatera Utara belum mencakup seluruh lapisan masyarakat secara merata dan belum berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

Untuk menangani kesenjangan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara, implementasi strategi kebijakan yang menyeluruh, terpadu, dan berfokus pada distribusi sumber daya secara merata di seluruh wilayah sangatlah esensial. Pemerintah daerah diharapkan untuk: 1) Memajukan pemerataan fasilitas infrastruktur di luar koridor utama Medan–Tebing Tinggi–Pekanbaru. Hal ini bertujuan untuk menghubungkan wilayah terpencil dengan pusat-pusat perekonomian dan memfasilitasi akses yang lebih baik ke pasar. 2) Memperkuat sektor agrikultur dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di area

pedesaan. Upaya ini dapat dilaksanakan melalui adopsi teknologi modern, perluasan akses terhadap pendanaan, serta penyelenggaraan program pelatihan kewirausahaan guna mendongkrak produktivitas penduduk. 3) Mempromosikan desentralisasi kegiatan ekonomi dan penanaman modal di tingkat daerah. Tujuannya adalah agar geliat pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di area perkotaan, melainkan juga merambah ke kabupaten lain yang kaya akan potensi sumber daya alam dan daya tarik pariwisata.

DAFTAR REFERENSI

- Anata, Firdaus. (2013). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, PDRB Perkapita, Jumlah Penduduk dan Index Williamson Terhadap Tingkat Kriminalitas. Malang.
- BPS Provinsi Sumatera Utara. (2024). Sumatera Utara Dalam Angka 2024. Badan Pusat Statistik.
- Chayyani, N. R. (2021). Indonesia Report 2021: Ketimpangan pendapatan dan pemulihan ekonomi nasional. Peneliti Bidang Ekonomi.
- Christian, Lumenta, Jhon S., Kekenusa, dan Djoni Hatidja. (2009). Analisis Jalur Faktor-Faktor Penyebab Kriminalitas. Manado.
- Djalal, Nachrowi, dan Hardius Usman. (2008). Penggunaan Teknik Ekonometrik. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Donny, Suryana. (2013). Analisis Perencanaan Pembangunan dalam Upaya pengurangan ketimpangan ekonomi di Kabupaten Jember Tahun 2006–2011. Jember.
- Dumairy. (2006). Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga.
- Gujarati, Damodar. (2003). Basic Ekonometrik (Ekonometrika Dasar) (Edisi keempat). McGraw-Hill/Irvin.
- Hamzah, Andi. (1986). Kamus Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, Ashani Nurul. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Tingkat Kriminalitas di Sumatera Utara (Melalui Pendekatan Eknomi). Medan.
- Hendry, Davy. (2014). Kriminalitas: Sebuah Sisi Gelap Dari Ketimpangan Distribusi Pendapatan. Padang.
- Hutabarat, R. (2023). Kemiskinan pedesaan dan akses infrastruktur di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Sosial Ekonomi*, 6(1), 44–59. Jakarta.
- Kartono, Kartini. (1994). Sinopsis Kriminologi Indonesia. Bandung: Maju Mundur.
- Kuncoro, Mudrajat. (2003). Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta: Erlangga.

- Lubis, F. (2023). Kemiskinan struktural di kawasan pesisir Sumatera. *Jurnal Maritim dan Pembangunan*, 5(1), 33–47.
- Putri, M., & Hadi, S. (2024). Disparitas pembangunan wilayah Sumatera Utara pasca pandemi COVID-19. *Jurnal Regional dan Kota*, 12(3), 201–218.
- Santoso, Topo, dan Eva Achjani. (2001). Kriminologi (Edisi I). Jakarta: Rajawali Persada.
- Siregar, A. (2022). Analisis ketimpangan pendapatan di Sumatera Utara 2015–2021. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 112–128.
- Soerodibroto, Soenarto. (1996). KUHP dan KUHAP Kriminalitas. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiarti, Yayuk. Kemiskinan Salah Satu Penyebab Timbulnya Tindak Kriminalitas. Sumenep.
- Sutanto, D. (2022). Pembangunan ekonomi daerah dan ketimpangan wilayah. *Jurnal Pembangunan Nasional*, 9(2), 55–71.
- Tambunan, T. (2023). Ketimpangan ekonomi dan kesejahteraan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(4), 77–94.
- Todaro, Michael P., dan Stephen C. Smith. (2011). Pembangunan Ekonomi (Edisi 11). Jakarta: Erlangga.
- Yudho, Dito Arsono. (2014). Pengaruh Variabel Pendidikan, Pengangguran, Rasio Gini, Usia, dan Jumlah Polisi Perkapita Terhadap Angka Kejahatan Property. Semarang.